TIM PENGGERAK PKK
KABUPATEN PACITAN

SOSIALISASI
HASIL RAKERNAS X
PKK TAHUN 2025

Oleh :

SEKRETARIS

TIM PENGGERAK KABUPATEN PACITAN

PACITAN, 5 AGUSTUS 2026

RAKERDA TP PKK PROVINSI JAWA TIMUR
TAHUN 2025

TINDAK LANJUT HASIL RAKERNAS X PKK TAHUN 2025

BIDANG UMUM / SEKRETARIS

O l e h :
S e k r e t a r i s
Tim Penggerak PKK Provinsi Jawa Timur
Vasa Hotel - Surabaya, 3 November 2025

TIM PENGGERAK PKK
KABUPATEN PACITAN



SOSIALISASI
HASIL RAKERNAS X
PKK TAHUN 2025

TIM PENGGERAK PKK
KABUPATEN PACITAN

Pacitan, 5 Agustus 2025



PENGUKUHAN PENGURUS TIM PENGGERAK PKK KABUPATEN PACITAN PERIODE TAHUN 2025 – 2030
KETUA TIM PENGGERAK PKK KABUPATEN PACITAN
IBU EFI INDRATA NUR BAYUAJI

LANDASAN HUKUM GERAKAN PKK

PERATURAN PRESIDEN
NOMOR : 99 TAHUN 2017
TENTANG
GERAKAN
PEMBERDAYAAN DAN
KESEJAHTERAAN
KELUARGA

PERMENDAGRI RI
NOMOR : 36 TAHUN 2020
Tentang
Peraturan Pelaksanaan
Peraturan Presiden
Nomor : 99 Tahun 2017
Tentang Gerakan
Pemberdayaan Dan
Kesejahteraan Keluarga

RUMUSAN HASIL RAKERNAS X PKK TAHUN 2025
Samarinda – Kalimantan Timur, 8 Juli 2025

Dengan mempertimbangkan hasil pembahasan pada rangkaian kegiatan Rapat Kerja Nasional X PKK, dan telaah terhadap kebutuhan aktual, serta dinamika pada Pelaksanaan Gerakan PKK Dan Merujuk Pada Arah Kebijakan Pembangunan Nasional, maka Tim Perumus Hasil Rakernas X PKK yang terdiri dari Tim Penggerak PKK Pusat dan perwakilan Tim Penggerak PKK Provinsi menyampaikan pandangan akhir sebagai

Rumusan Hasil Rakernas X PKK Tahun 2025

RUMUSAN HASIL RAKERNAS X PKK TAHUN 2025

No : 1, 2, 3
J E L A S



No. 4 :
3 Buku telah disahkan Mendagri RI



MENGUSULKAN :
REVISI PERMENDAGRI Nomor 36 Tahun 2020

Menyusun strategi Gerakan pkk, integrasi proker, kolaborasi dg multi pihak, pedygunaan Klp PKK

RUMUSAN HASIL RAKERNAS X PKK TAHUN 2025

1

Gerakan PKK Tahun 2025-2029 berkomitmen mendukung Visi Misi Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia serta Arah Kebijakan Pembangunan Nasional. Komitmen ini sejalan dengan Visi Gerakan PKK Tahun 2025-2029 : "Terwujudnya Keluarga Berdaya dan Sejahtera untuk Mendukung Asta Cita Menuju Indonesia Emas 2045". Visi tersebut akan diwujudkan melalui 5 (lima) Misi strategis yang diturunkan ke dalam berbagai program unggulan dan program prioritas.

2

Menyepakati Rencana Induk Gerakan PKK Tahun 2025-2029 dan Strategi Gerakan PKK Hasil Rakernas X PKK Tahun 2025 sebagai acuan utama dalam perencanaan dan pelaksanaan program/ kegiatan di semua jenjang kelembagaan Gerakan PKK.

3

Menyepakati Petunjuk Teknis Tata Kelola Kelembagaan Gerakan PKK sebagai pedoman dalam menjalankan tugas, fungsi dan tata kelola organisasi secara berjenjang dan terpadu.

4

Mengusulkan 3 (Tiga) Dok :

1. **Rencana Induk Gerakan PKK Tahun 2025-2029**
2. **Strategi Gerakan PKK**
3. **Petunjuk Teknis Tata Kelola Kelembagaan Gerakan PKK**

Untuk disahkan sebagai Hasil Rakernas X PKK Oleh Ketua Umum Tim Penggerak PKK dan ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri selaku Ketua Pembina Tim Penggerak PKK Pusat. Selanjutnya, dokumen-dokumen tersebut akan menjadi rujukan resmi dalam pelaksanaan Gerakan PKK di seluruh jenjang.

5

Mengusulkan revisi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2017 tentang Gerakan PKK, dengan penyesuaian sebagai berikut:

a. **Mengubah masa Jabatan Ketua TP PKK Desa disesuaikan dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa;**
b. **Pengusulan Wakil Ketua pada struktur Tim Penggerak PKK Provinsi dan Kabupaten/Kota;**
c. **Menambahkan Sekretaris III pada struktur Tim Penggerak PKK Provinsi dan Sekretaris II pada struktur Tim Penggerak PKK Kabupaten/Kota;**
d. **Pengintegrasian Kelompok Dasawisma ke dalam struktur Kelompok PKK, selain Kelompok PKK Dusun/Lingkungan, RW dan RT; dan**
e. **Penyesuaian lainnya sebagaimana tertuang dalam Petunjuk Teknis Tata Kelola Kelembagaan Gerakan PKK.**

6

Mendorong seluruh TiP PKK di semua jenjang pusat dan daerah untuk :

a. **Menyusun Strategi Gerakan PKK setiap tahunnya, sebagai langkah operasional dalam mencapai Visi dan Misi Gerakan PKK 2025–2029;**
b. **Mengintegrasikan program-program PKK ke dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah dan desa;**
c. **Melakukan sinergi dan kolaborasi multipihak dengan pemangku kepentingan, seperti kementerian / lembaga, perangkat daerah, sektor swasta, lembaga donor, institusi pendidikan, media, lembaga kemasyarakatan, lembaga swadaya masyarakat dan pihak lainnya dalam mendukung pelaksanaan program; dan**
d. **Melakukan penataan, pembinaan dan pendayagunaan Kelompok PKK di tingkat Dusun/Lingkungan, RW dan RT melalui penetapan kepengurusan oleh Kepala Desa/Lurah, pemberian asistensi dan supervisi, serta penguatan kapasitas melalui pelatihan yang berkelanjutan dan berbasis potensi lokal.**

RAKERDA TIM PENGGERAK PKK PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2025

KEPUTUSAN KETUA UMUM TIM PENGGERAK PKK
Nomor : 012/KEP/PKK.Pst/VIII/2025

T E N T A N G
PENETAPAN HASIL RAPAT KERJA NASIONAL X PKK TAHUN 2025

KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI
NOMOR : 400.7 – 3465 TAHUN 2025
T EN T A N G

PENGESAHAN KEPUTUSAN KETUA UMUM TIM PENGGERAK PEMBERDYAAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA TENTANG HASIL RAPAT KERJA NASIONAL X PKK TAHUN 2025

HASIL RAKERNAS X PKK TAHUN 2025
Periode Masa Bakti Tahun 2025 - 2030







File telah dikirim ke Sekretaris Pokja I, II, III & IV

V I S I

Gerakan PKK Tahun 2025-2029

"Terwujudnya Keluarga Berdaya dan Sejahtera untuk Mendukung Asta Cita Menuju Indonesia Emas 2045".

Visi ini menegaskan pentingnya peran strategis keluarga sebagai aktor utama dalam menciptakan masyarakat yang adil, sejahtera, tangguh dan berkarakter, dengan menempatkan keluarga sebagai pusat pembangunan manusia

5 MISI GERAKAN PKK TAHUN 2025 - 2029

1. Memperkokoh nilai Pancasila, gotong royong dan demokrasi dalam kehidupan keluarga serta meningkatkan kesadaran akan hak asasi manusia.

2. Meningkatkan kualitas pendidikan dan keterampilan serta penguatan ekonomi keluarga

3. Memantapkan ketahanan dan kemandirian keluarga melalui penguatan pangan lokal, pelestarian sandang berbasis budaya lokal yang beretika, serta peningkatan kualitas hunian dan tata laksana rumah tangga yang sehat, tertib, dan berkelanjutan

4. Menggerakkan keluarga dalam perilaku hidup bersih & sehat, melestarikan lingkungan hidup dan meningkatkan pembinaan Klg berencana menuju keluarga berkualitas.

5. Memperkuat kelembagaan PKK yang lebih sistematis dan terencana, serta mendorong pemanfaatan teknologi informasi



LATAR BELAKANG, DASAR HUKUM, MAKSUD & TUJUAN

VISI, MISI, AZAS, TUJUAN & SASARAN

OPERASIONAL 10 PROGRAM POKOK PKK

DITETAPKAN OLEH MENDAGRI RI

MAKSUD DAN TUJUAN
Rencana Induk Gerakan PKK Tahun 2025 – 2029



AZAS – AZAS GERAKAN PKK

1. Gotong Royong
2. Responsif
3. Transparansi
4. Informatif
5. Partisipatif & Inklusif
6. Akuntanbilitas
7. Kearifan Lokal
8. Kemitraan
9. Kemandirian
10. Kemanusiaan
11. Keberlanjutan
12. Nasionalisme
13. Non Partisan

TUJUAN & SASARAN

TERLAKSANANYA PROGRAM

1. Tertanamnya Nilai – Nilai Pancasila
2. Budaya Gotong Royong Masyarakat
3. Ketahanan Pangan bagi keluarga
4. Sandang Berbasis Budaya Lokal
5. Lingkungan rumah yang sehat, aman, dan tertata
6. Kualitas pendidikan & keterampilan keluarga serta TI
7. Meningkatkan Derajat Kesehatan Keluarga
8. Pengembangan Kehidupan Berkoperasi & Kewirausahaan
9. Kelestarian Lingkungan Hidup oleh Keluarga
10. Perencanaan kehidupan berkeluarga yang sehat
11. Kelembagaan PKK yg efektif, efisien, adaptif &berdaya

Note :
Tujuan & Sasaran hampir sama

OPERASIONAL
10 PROGRAM POKOK PKK

- PENGHAYATAN DAN PENGAMALAN PANCASILA
- GOTONG ROYONG
- P A N G A N
- S A N D A N G
- PERUMAHAN DAN TATA LAKSANA RUMAH TANGGA



- PENDIDIKAN & KETRAMPILAN
- K E S E H A T A N
- PENGEMBANGAN KEHIDUPAN BERKOPERASI
- KELESTARIAN LINGKUNGAN HIDUP
- PERENCANAAN SEHAT

PEMETAAN 10 PROGRAM PKK DENGAN ARAH KEBIJAKAN NASIONAL

No	Program Pokok PKK	Tujuan	Sasaran	KATEGORI PRIORITAS	KEBIJAKAN NASIONAL YANG DIDUKUNG
1	**Penghayatan dan Pengamalan Pancasila**	Tertanamnya Nilai2 Pancasila Dlm Kehidupan Keluarga & masyarakat	Meningkatnya partisipasi keluarga yang mengikuti kegiatan pembinaan nilai kebangsaan, bela negara, kesadaran hukum, dan penguatan karakter keluarga.	Pembinaan karakter keluarga	▪ Asta Cita 1 : Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan HAM. ▪ Asta Cita 4 : Memperkuat pembangunan SDM, sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas.
	Dibahas di Pokja I, II, III & IV				

OPERASIONALISASI 10 PROGRAM POKOK PKK TAHUN 2025 - 2029

NO	PROGRAM POKOK PKK	KATEGORI PRIORITAS	KEGIATAN UTAMA	INDIKATOR KINERJA	WAKTU PELAKSANAAN
1	Penghayatan dan Pengamalan Pancasila	Pembinaan karakter keluarga	1. Pembinaan Keluarga Indonesia Sejahtera Harmonis (KISAH) 2. Pembinaan Keluarga Sadar Hukum (KADARKUM) 3. Pembinaan Kesadaran Bela Negara (PKBN) 4. Keluarga Indonesia Sehat Tanpa Narkoba (KRISAN) 5. Pembinaan Keluarga Indonesia Lindungi Anak dari Kekerasan Seksual (KILAS) 6. Pembinaan Keluarga Indonesia Anti Trafficking (KIAT)	1) Jumlah kegiatan yang dilaksanakan 2) Persentase keterlibatan keluarga 3) Pelibatan mitra unsur pemerintah atau non-pemerintah 4) Dokumentasi (laporan kegiatan, foto, publikasi media)	Th. 2025 - 2029



1. Rumusan Hasil Rakernas X PKK Tahun 2025
2. Isue Strategis & Strategi Gerakan PKK
3. Analisa SWOT Gerakan PKK
4. Arah Kebijakan
5. Rumusan Proses dan Metode Pelaksanaan
6. Perencanaan Program
7. Program Unggulan Gerakan PKK Th. 2025 - 2029

STRATEGI GERAKAN PKK



ISU STRATEGIS TATA KELOLA KELEMBAGAAN

1. Belum Optimalnya Integrasi Program Dalam Sistem Perencanaan Pmbangunan Daerah Dan Desa
2. Belum optimalnya regenerasi Pengurus TP PKK dan Kader PKK
3. Belum optimalnya penataan kelompok PKK di tingkat dusun, RW dan RT serta kelompok dasawisma
4. Belum optimalnya penataan klp PKK di Tk dusun, RW, RT & Klp Dawis
5. Belum optimalnya kemitraan multipihak
6. Belum optimalnya sistem monitoring dan evaluasi

STRATEGI GERAKAN PKK

- TERARAH
- INTEGRATIF
- RESPONSIF

→ **DINAMIKA SOSIAL, EKONOMI & LINGKUNGAN**

UNTUK MEMPERKUAT PERAN KELUARGA

sebagai

- Aktor Utama Pembangunan
- Meningkatkan Daya Jangkau
- Meningkatkan Daya Guna Program

MENYUSUN STRATEGI YG TEPAT → **ANALISIS INTERNAL DAN EKSTERNAL GERAKAN PKK** → **PENDEKATAN SWOT (STRENGTH, WEAKNESSES, OPPORTUNITIES, THREATS)**

3 (TIGA) PILAR UTAMA STRATEGI GERAKAN PKK



Penguatan Keluarga sebagai Subjek Pembangunan

- Kemandirian Klg
- Partisipasi Aktif Klg

Penguatan Kapasitas Kader dan Kelembagaan PKK

- Kapasitas Kader
- Klembgaan PKK
- Sistem informasi dan Data Keluarga

Peningkatan Kualitas Program dan Kemitraan

- Inovasi Prog Ungulan
- Prog Terpadu PKK dg RPJMN / RPJMD
- kemitraan lintas sekto

ARAH KEBIJAKAN GERAKAN PKK TAHUN 2025 - 2029

1. Mengarusutamakan pendekatan klg dalam seluruh proses pembangunan
2. Mengintegrasikan program PKK dalam perencanaan pmbangunan daerah dan desa
3. Mewujudkan transformasi digital dalam tata kelola Gerakan PKK,
4. Mengembangkan model-program yang adaptif terhadap isu lokal dan inklusif bagi kelompok rentan
4. Monitoring dan evaluasi berbasis hasil dengan indikator terukur dan mekanisme pelaporan berjenjang

PROGRAM UNGGULAN GERAKAN PKK
P – APBD 2025



PERENCANAAN

PELAKSANAAN

EVALUASI

Modernisasi IT
Sekretaris

PAAREDI
Pokja I

KELUARGA SEHAT TTB
Pokja IV





GELARI PELANGI
Pokja II

KETAPANG MAS
Pokja III







PROGRAM UNGGULAN

MEMPERKUAT KELEMBAGAAN PKK TERFOKUS PADA TEKNOLOGI INFORMASI

INDIKATOR

1. Jumlah Kader PKK dan Dasawisma yang terlatih
2. Jumlah dan jenis Juknis Panduan Kelembagaan PKK yang tersusun
3. Jumlah jenis Sistem Informasi Gerakan PKK / E-PKK
4. Data Dan Informasi 10 Program Pokok PKK

SASARAN

- Pengurus TP PKK
- Kelompok PKK
- Kader PKK
- Dasawisma


BUKU III
PETUNJUK TEKNIS
TATA KELOLA
KELEMBAGAAN GERAKAN PKK
HASIL RAPAT KERJA NASIONAL (RAKERNAS) X PKK
TAHUN 2025
DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMERINTAHAN DESA
KEMENTERIAN DALAM NEGERI &
TIM PENGGERAK PKK PUSAT


Kelembagaan
Atribut PKK
Administrasi PKK
Pembinaan
Pemantauan
Evaluasi
Pelaporan

JUKNIS TATA KELOLA KELEMBAGAAN PKK TAHUN 2025 - 2029

Sebagai Pedoman Atau Panduan Dalam Pengelolaan Kelembagaan Gerakan PKK Dan Administrasi PKK Di Tingkat Pusat Dan Daerah

TUJUAN

1. Kelembagaan yang optimal
2. Menjamin keseragaman program
3. Meningkatkan Kualitas Kader
4. Memperkuat Sistem Administrasi
5. Mendukung Koordinasi dan Sinkronisasi
6. Meningkatkan Akuntabilitas dan transparansi
7. Memfasilitasi Pmberdayaan Masyarakat

Tetap

BIDANG KELEMBAGAAN

Kelembagaan dan Pengelolaan Gerakan PKK

Tim PenggerakPKK dibentuk di :

Pusat

Provinsi

Kabupaten/Kota

Kecamatan

Desa/Kelurahan



BAGAN MEKANISME KELEMBAGAAN GERAKAN PKK KABUPATEN / KOTA

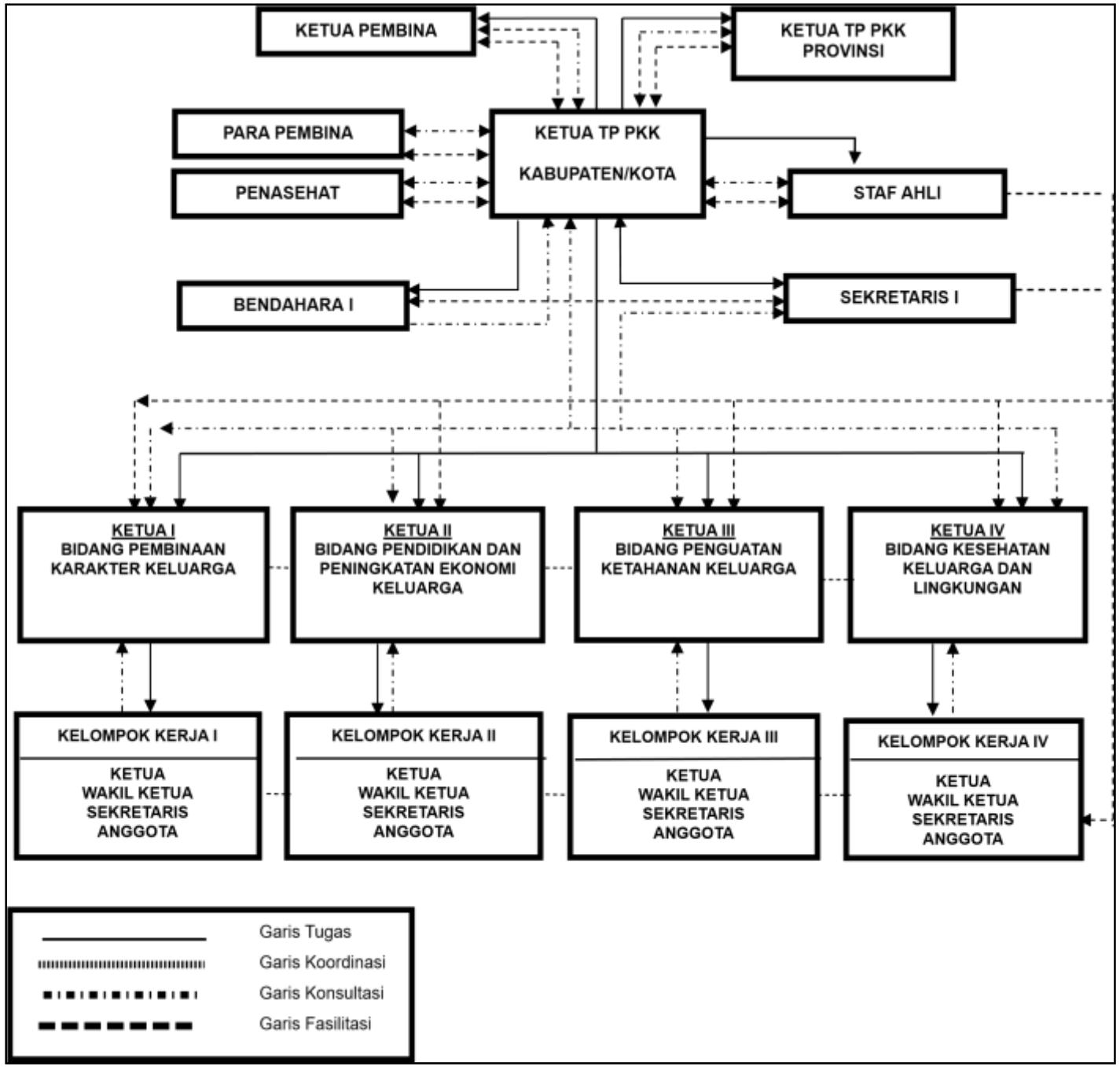

BAGAN MEKANISME KELEMBAGAAN GERAKAN PKK KECAMATAN

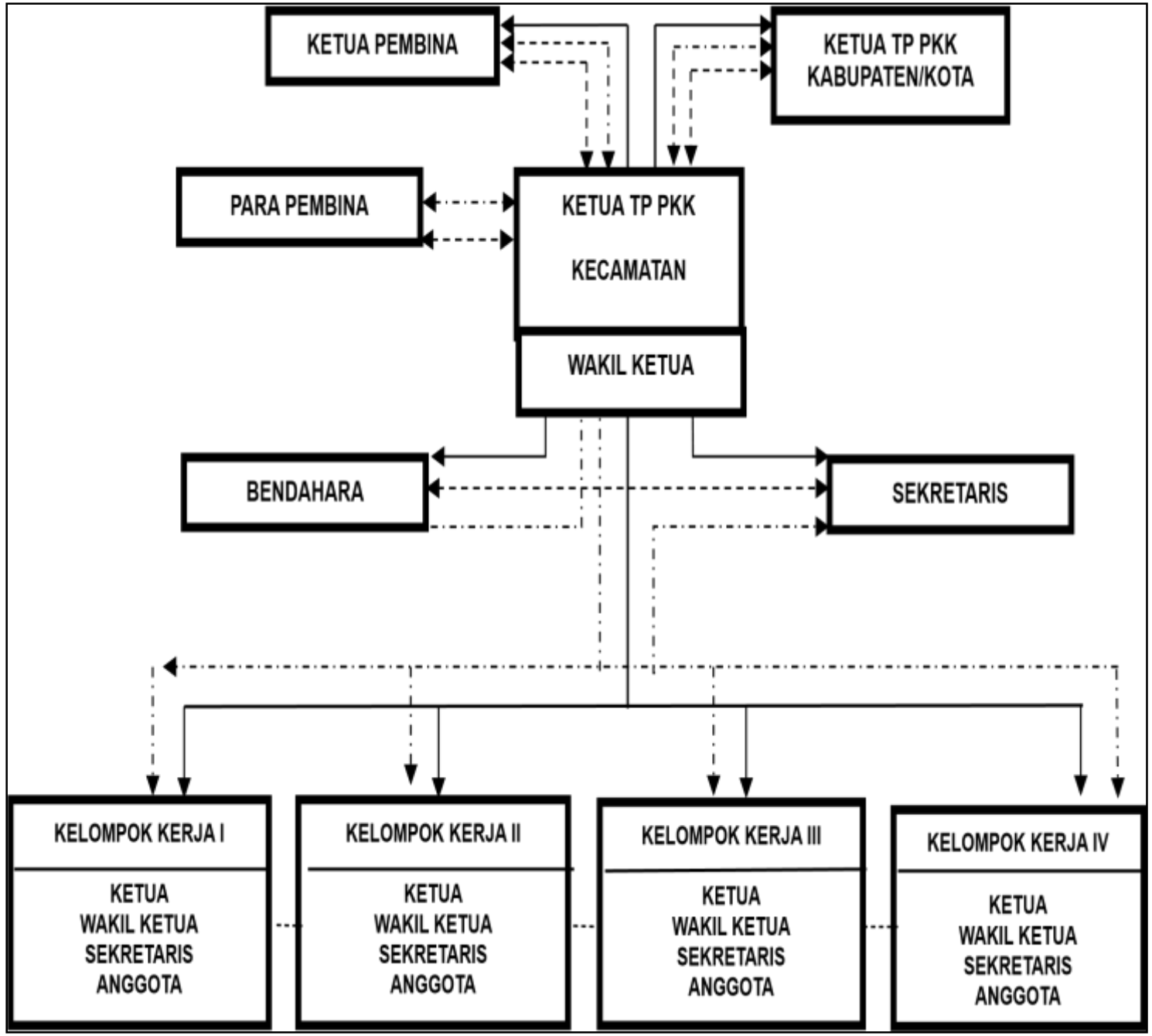

Garis Tugas

Garis Koordin asi

Garis Konsultasi

Garis Fasilitasi

BAGAN MEKANISME KELEMBAGAAN GERAKAN PKK DESA / KELURAHAN

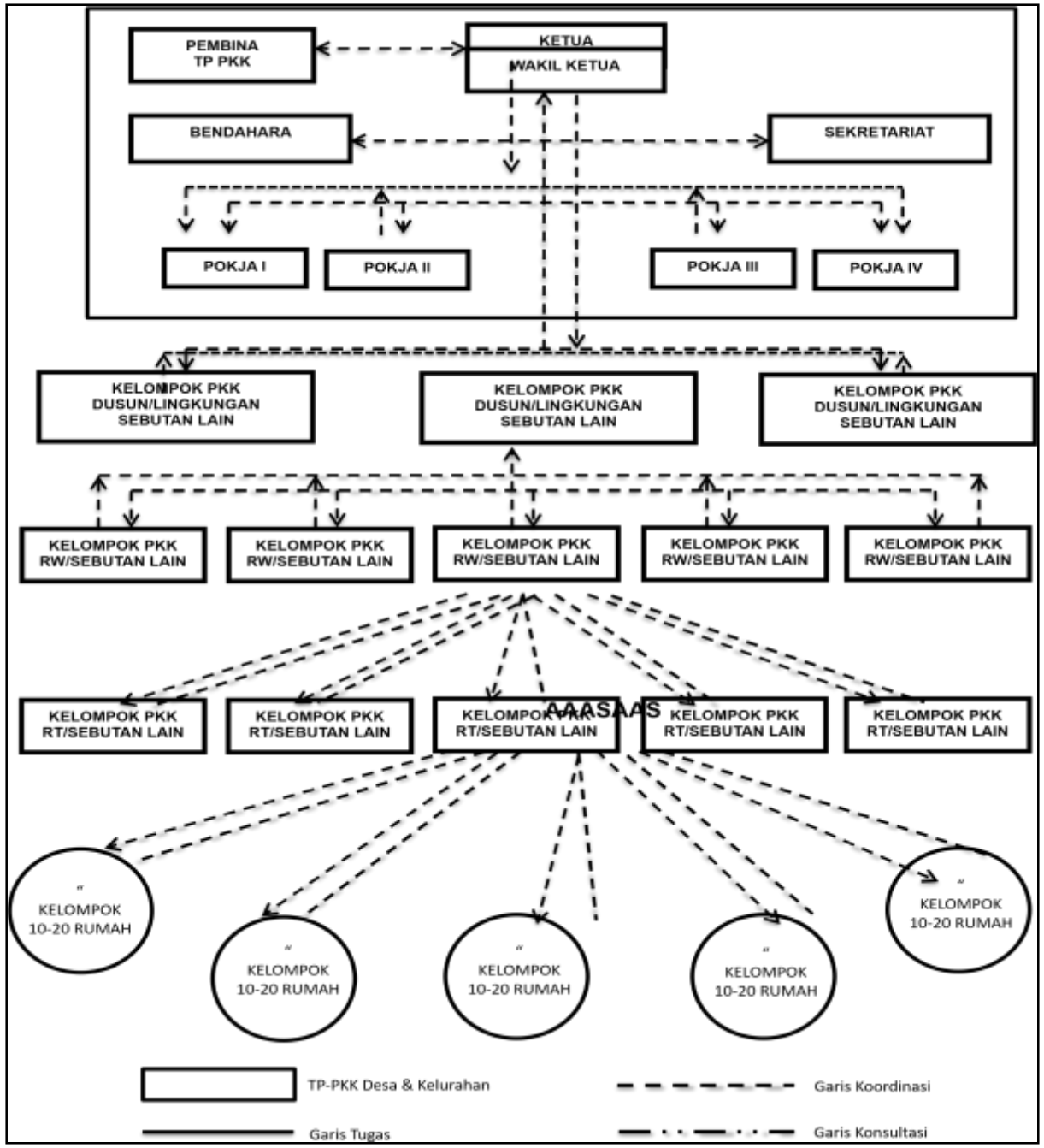

B. SUSUNAN KEPENGURUSAN TP PKK

BERUBAH

Susunan keanggotaan TP PKK
harus memperhatikan azas daya guna dan hasil guna serta struktur kerja ramping dan kaya fungsi.

PROVINSI

a. Susunan Kepengurusan:

1) Ketua
2) Ketua I, II, III & IV
3) Sekretaris
4) Bendahara
5) PokjaI, II, III dan IV :
   a) Ketua b) Wakil Ketua
   c) Sekretaris d) Anggota
   Max : 6 Org
6) Staf Ahli : Max 2 Org

KABUPATEN/KOTA

a. Susunan Kepengurusan:

1) Ketua
2) Ketua I, II, III & IV
3) Sekretaris
4) Bendahara
5) PokjaI, II, III dan IV :
   a) Ketua b) Wakil Ketua
   c) Sekretaris d) Anggota
   Max : 10 org
6) Staf Ahli : max. 2 org

Tetap

Ketua I, II, III dan IV :

Ketua I : Bidang Pembinaan Karakter Keluarga

Ketua II : Bidang Pendidikan & Peningkatan Ekonomi Keluarga

Ketua III : Bidang Penguatan Ketahanan Keluarga

Ketua IV : Bidang Kesehatan Keluarga dan Lingkungan

KECAMATAN & DESA / KELURAHAN (Sama)

Tetap

Susunan Kepengurusan :

1) Ketua

2) Wakil Ketua

3) Sekretaris

4) Bendahara

5) Kelompok Kerja (POKJA) I, II, III dan IV :

Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris dan Angota

Tidak ada Sahli

KRITERIA PENGURUS TP PKK

BERUBAH

1. Warga Negara Indonesia
2. Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
3. Menjunjung tinggi Pancasila dan UUD 45 serta Bhinneka Tunggal Ika
4. Sehat jasmani dan rohani
5. Memiliki kemauan, kemampuan, dan waktu serta dapat melaksanakan tugasnya secara profesional dan bertanggungjawab.
6. Mempunyai loyalitas dan integritas yang tinggi
7. Bersifat perorangan berdasarkan kemampuan dan kapasitas pribadi, tidak mewakili suatu organisasi, golongan, partai politik, lembaga atau instansi.
8. Tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara.
9. Usia minimal 18 tahun.
10. Tidak tergabung dalam organisasi terlarang.
11. Tidak terlibat penyalahgunaan NAPZA (Narkotika, Psikotropika dan Zat adiktif lainnya).

PENGANGKATAN & PELANTIKAN KETUA TP PKK KABUPATEN/KOTA

Tetap

I. Ketua TP PKK Daerah

1. **Ketua TP PKK Kabupaten/Kota ditetapkan & dilantik oleh Ketua TP PKK Provinsi & dikukuhkan oleh Bupati/Walikota selaku Ketua Pembina TP PKK Kabupaten/Kota.**
2. **Ketua TP PKK Kecamatan ditetapkan & dilantik oleh Ketua TP PKK Kabupaten/Kota & dikukuhkan oleh Camat selaku Ketua Pembina TP PKK Kecamatan.**
3. **Ketua TP PKK Desa/Kelurahan ditetapkan & dilantik oleh Ketua TP PKK Kecamatan & dikukuhkan oleh Kepala Desa/Lurah selaku Ketua Pembina TP PKK Desa/Kel.**

Tetap

II. Pengurus

1. **Pengurus TP PKK Kabupaten/Kota ditetapkan dengan Keputusan Bupati/Wali Kota dan dilantik oleh Bupati/Walikota, selaku Ketua Pembina TP PKK Kabupaten/Kota.**

2. **Pengurus TP PKK Kecamatan ditetapkan dengan Keputusan Bupati/Wali Kota yang ditandatangani Camat atas nama Bupati/Wali Kota dan dilantik oleh Camat selaku Ketua Pembina TP PKK Kecamatan atas nama Bupati/Walikota berdasarkan pendelegasian kewenangan yang diberikan.**

3. **Pengurus TP PKK Kelurahan ditetapkan dengan Keputusan Bupati/Wali Kota yang ditandatangani Lurah atas nama Bupati/Wali Kota dan dilantik oleh Lurah, selaku Ketua Pembina TP PKK Kelurahan atas nama Bupati/Walikota berdasarkan pendelegasian kewenangan yang diberikan.**

4. **Pengurus TP PKK Desa ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa dan dilantik oleh Kepala Desa selaku Ketua Pembina TP PKK Desa**

TATA CARA PELANTIKAN, PENGUKUHAN & SERAH TERIMA

Kabupaten/Kota, Kecamatan, Desa & Kelurahan

Tetap

a. Pelantikan dan Pengukuhan

1) Ketua TP PKK Kabupaten/ Kota/Kecamatan/ Desa/ Kelurahan dilantik oleh Ketua Ketua TP PKK setingkat di atasnya.
2) Naskah pelantikan ditandatangani oleh Ketua Tim Penggerak PKK setingkat di atasnya
3) Ketua TP PKK Kabupaten/Kota/Kecamatan/Desa/Kel dikukuhkan oleh Ketua Pembina setempat didaerahnya.
4) Naskah pengukuhan ditandatangani oleh Ketua Pembina setempat.

Tetap

b. Serah Terima

1) Serah terima dari Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi, Kabupaten/Kota, Kecamatan, dan Desa/ Kelurahan yang lama kepada yang baru dilaksanakan di daerah masing-masing.

2) Ketua Tim Penggerak PKK lama menyerahkan laporan pelaksanaan masa bakti kepengurusan kepada Ketua Tim Penggerak PKK baru.

3) Naskah serah terima ditandatangani oleh Ketua TP PKK yang lama dan Ketua TP PKK yang baru serta diketahui oleh kepada Ketua Pembina.

Tetap

DASAR PELANTIKAN DAN SERAH TERIMA

Daerah (Provinsi / Kabupaten / Kota)

Keputusan Ketua Umum/Ketua TP PKK setingkat di atasnya tentang pemberhentian dan pengangkatan Ketua TP PKK

UNDANGAN

Pelantikan, pengukuhan dan serah terima di setiap jenjang dapat mengundang sesuai dengan situasi kondisi dan kebutuhan.

PETUGAS ACARA PELANTIKAN, PENGUKUHAN DAN SERAH TERIMA

Daerah (Provinsi, Kabupaten / Kota)

Tim pelaksana acara pelantikan, pengukuhan, dan serah terima adalah pengurus PKK atau yang ditunjuk

Tetap

Pembacaan Surat Keputusan:

Untuk Ketua TP PKK Daerah oleh pengurus TP PKK setingkat di atasnya atau yang ditunjuk.

Penyiapan naskah Pelantikan

1. TP PKK Pusat oleh Kementerian Dalam Negeri.
2. TP PKK Daerah oleh TP PKK satu tingkat di atasnya

**** Penyiapan naskah pengukuhan oleh Badan/dinas yang membidangi pemberdayaan setempat.**
****Penyiapan naskah serah terima oleh TP PKK setempat**

Ketentuan Lainnya

a. Apabila Ketua TP PKK dijabat oleh Pelaksana Tugas/Pelaksana Harian/Pejabat Sementara ditetapkan dengan surat keputusan Ketua Umum/Ketua setingkat diatasnya dapat melaksanakan tugas tanpa dilakukan pelantikan.

b. Apabila Ketua Umum/Ketua TP PKK yang berhak melantik tidak hadir karena sakit/berhalangan, dapat menunjuk pengurus TP PKK Pusat/Daerah untuk mewakili.

c. Pelantikan dan pengukuhan Ketua TP PKK Daerah dapat dilakukan secara bersamaan terhadap lebih dari satu Ketua TP PKK yang setingkat, dengan mempertimbangkan situasi dan kondisi daerah setempat.

d. Pelaksanaan pelantikan dan pengukuhan Ketua TP PKK Kabupaten/ Kota dapat dilakukan dengan mengambil tempat di ibukota Provinsi, atau ibukota Kabupaten/Kota yang bersangkutan dengan mempertimbangkan situasi dan kondisi daerah setempat.

d. Pelaksanaan pelantikan, pengukuhan, dan serah terima dapat dilaksanakan secara bersamaan dengan mempertimbangkan situasi dan kondisi daerah setempat.

e. Pelaksanaan pelantikan, pengukuhan, dan serah terima dapat dilaksanakan dalam jaringan *(daring) dengan mempertimbangkan dan menyesuaikan situasi dan kondisi setempat.*

f. Pengaturan tata letak/denah/tempat duduk. (Lampiran 2.7)

g. Susunan Acara Pelantikan Ketua TP PKK (Lampiran 2.8.1)

h. Naskah Serah Terima, Pelantikan, dan Pengukuhan (Lampiran 2.8.2)

Seragam Resmi PKK



Seragam Kerja PKK



Seragam Lapangan PKK



Masa bakti, Pergantian Pengurus TP PKK & Atribut Hal. 22 s/d. Hal 73 : T E T A P

ADMINISTRASI PKK

Mulai Halaman 75

PERBEDAAN
HASIL RAKERNAS X PKK TH. 2025 DENGAN RAKERNAS IX PKK TH. 2021

NO	RAKERNAS X PKK TAHUN 2025	RAKERNAS IX PKK TAHUN 2021
1	Susunan Pengurus TP PKK Provinsi, Kab/Kota, Kec, Ds/Kel : **sama**	S a m a
2	Jumlah Anggota Pokja Max : 10 Orang, Staf Ahli : 2 Org	Jumlah Pengurus tidak disebut
3	Kriteria Pengurus TP PKK : 11 item	Kriteria Pengurus TP PKK : 7 item
4	Bagan Mekanisme Kelembagaan Gerakan PKK : sama (hanya beda posisi garis)	S a m a
5	Bagan Struktur TP PKK Kab/Kota : Ditambah Penasehat, dg garis konsultasi & fasilitasi Ada garis Tugas Ketua ke Staf Ahli	Hanya Garis Koordinasi & Garis Konsultasi
6	Bagan Struktur TP PKK Kecamatan sendiri - sendiri	Kec & Desa / Kel sama jadi satu
7	Pelantikan : Ditambah Ketua TP PKK Masa Bakti sebelumnya	Tidak ada Ketua TP PKK Masa Bakti sebelumnya

NO	RAKERNAS X PKK TAHUN 2025	RAKERNAS IX PKK TAHUN 2021
8	Form Kader Umum & Kader Khusus : **tetap / sama**	S a m a
9	Surat Keputusan Ketua : **tidak ada kata memperhatikan** **Salinan Surat Keputusan ini disampaikan kpd Yth :**	Ada kata memperhatikan Salinan ditulis dibawahnya
10	Buku Daftar Anggota TP PKK Ds/Kel : 11 kolom (tetap)	Tetap
11	Buku Daftar Anggota TP PKK dan Kader : 13 kolom (tetap)	S a m a
12	Rekapitulasi Catatan Data Dan Kegiatan Warga Kelompok Dasa Wisma : 29 kolom	30 Kolom
13	Rekapitulasi Catatan Data Dan Kegiatan Warga Kelompok PKK RT : 30 kolom	31 kolom
14	Catatan Data Dan Kegiatan Warga Kelompok PKK RW : 32 kolom	33 kolom

NO	RAKERNAS X PKK TAHUN 2025	RAKERNAS IX PKK TAHUN 2021
15	Catatan Data Dan Kegiatan Warga Kelompok PKK Dusun/Lingkungan : 33 kolom	34 kolom
16	Catatan Data Dan Kegiatan Warga TP PKK Desa/Kelurahan Tahun …. : 33 kolom	34 kolom
17	Catatan Data Dan Kegiatan Warga TP PKK Kecamatan Tahun .... : 35 kolom	36 kolom
18	Catatan Data Dan Kegiatan Warga TP PKK Kab/Kota Tahun… : 36 kolom	37 kolom
19	Catatan Data Dan Kegiatan Warga TP PKK Provinsi Th. … : 37 kolom	38 Kolom

BUKU ADMINISTRASI PKK

6 (Enam) Buku Wajib

Mencatat keadaan dan kegiatan PKK dari tTngkat Desa/ Kelurahan sampai dengan Tingkat Pusat

1

Buku Daftar Anggota TP PKK dan Kader PKK

Mencatat daftar nama Anggota TP PKK & Kader PKK di tingkat desa/kelurahan.
Buku Daftar Anggota Lamp 4. 9a & Buku Daftar Anggota TP PKK & Kader, Lampiran 4.9b

2

Buku Agenda Surat Masuk / Keluar

Mencatat surat-surat yang masuk (diterima) dan surat-surat yang keluar (dikirim).
Contoh: Buku Agenda Surat Masuk/Keluar, Lampiran 4.10

3

Buku Keuangan

Untuk mencatat jumlah penerimaan dan jumlah pengeluaran anggaran untuk kegiatan TP PKK.
Contoh: Buku Keuangan, Lampiran 4.11

BUKU ADMINISTRASI PKK

6 (Enam) Buku Wajib

Mencatat keadaan dan kegiatan PKK dari tTngkat Desa/ Kelurahan sampai dengan Tingkat Pusat

4

Buku Notulen

Mencatat jalannya rapat/pertemuan & hasilnya yang diselenggarakan/ diikuti oleh TP PKK. Setiap notulen harus ditandatangani oleh pembuat notulen & disahkan dengan ditandatangani oleh pimpinan rapat meliputi:

a) Tanggal
b) Waktu/Jam mulainya
c) Tempat rapat
d) Jenis rapat/pertemuan
e) Isi Notulen mencakup:
- Pimpinan rapat
- Jumlah yang diundang
- Jumlah yg hadir & yg tidak hadir
- Susunan acara
- Uraian jalannya rapat
- Kesimpulan rapat
- Penutup

5

Buku Inventaris

Untuk mencatat daftar barang yang dimiliki oleh Kantor TP PKK, di setiap jenjang

Contoh : Buku Inventaris, Lampiran 4.12

6

Buku Kegiatan

Untuk mencatat setiap kegiatan yang diadakan/ diikuti oleh Anggota TP PKK.

a) Setiap selesai melaksanakan kegiatan, yang mendapatkan tugas menandatangani buku kegiatan ini.

b) Apabila yang bertugas terdiri dari beberapa orang, yang tanda tangan cukup satu orang yang ditunjuk sebagai Ketua dari kelompok yang sedang melaksanakan kegiatan dengan mencantumkan seluruh nama-nama pelaksana lainnya.

Contoh: Buku Kegiatan, Lampiran 4.13

c) Apabila diperlukan dapat menambah buku lain misalnya Buku Tamu, Buku Ekpesidi,dll. Hasil rekapitulasi dan kesimpulannya dijadikan bahan penyusunan laporan berkala mengenai kegiatan yang sudah dilaksanakan.

PERENCANAAN PROGRAM KERJA TAHUN 2027

RAPAT PLENO	RAPAT INTI	MONEV 10 PROGRAM POKOK PKK KE 12 KECAMATAN
EVALUASI 10 PROGRAM POKOK PKK	EVALUASI 10 PROGRAM POKOK PKK	PELATIHAN PERAN FUNGSI PKK
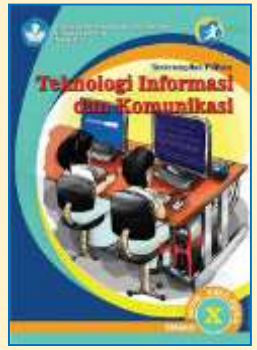	Pembinaan Pilot Project Program Unggulan TP PKK Di Kabupaten Pacitan Tahun 2027	

TERIMA KASIH
&
SELAMAT BERKARYA

